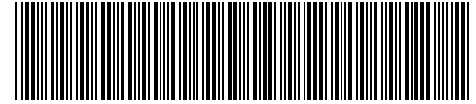




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.686442/2025**



DS:4706-5970-4178-9243

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 19.166.219.000 (SEMBILAN BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	19.166.219.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 19.166.219.000

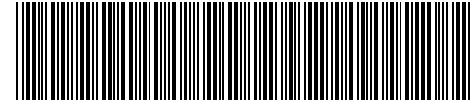
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025



DS:4706-5970-4178-9243

Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	837.994.000
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp.	837.994.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.328.225.000
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	Rp.	61.265.000
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	Rp.	333.000.000
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	Rp.	15.888.840.000
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	Rp.	2.045.120.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			837.994.000
Kegiatan	:	5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			837.994.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			
		2. 02	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi			
		3. 03	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting			
		4. 04	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi			
		5. 05	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi			
		6. 06	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	478.210.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,00	layanan	478.210.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	359.784.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	12,00	laporan	359.784.000
Program	:	115.01.WA	Program Dukungan Manajemen			18.328.225.000
Kegiatan	:	4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal			61.265.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai evaluasi SAKIP			
		2. 02	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Pengawasan Internal			
		3. 03	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



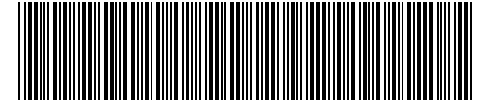
DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 1	:	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	61.265.000
Rincian Output	:	01 EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	4.00	Dokumen	61.265.000
Kegiatan	:	4356	Pengelolaan Data dan Informasi			333.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia			
		2. 02	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	333.000.000
Rincian Output	:	01 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	4.00	Laporan	151.150.000
		02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4.00	Laporan	181.850.000
Kegiatan	:	6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum			15.888.840.000
	:	1. 01	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset			
		2. 02	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)			
		3. 03	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu			
		4. 04	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting			
		5. 05	Nilai SAKIP Biro Perencanaan			
		6. 06	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu			
		7. 07	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan			
		8. 08	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	15.448.695.000
Rincian Output	:	01 EBA.956	Layanan BMN	4.00	Layanan	519.723.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	8.00	Layanan	14.928.972.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



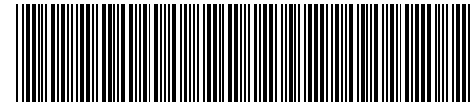
DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	440.145.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	124.620.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00	Dokumen	60.375.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	4.00	Dokumen	126.170.000
		:	04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4.00	Dokumen	128.980.000
Kegiatan		:	6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM			2.045.120.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Dokumentasi hukum yang progresif			
		:	2. 01	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu			
		:	3. 02	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan			
		:	4. 03	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi			
		:	5. 04	Persentase pegawai yang yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi			
		:	6. 05	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
		:	7. 06	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan			
		:	8. 07	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan			
		:	9. 08	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.872.710.000
Rincian Output		:	01	EBA.957 Layanan Hukum	9.00	Laporan	277.625.000
		:	02	EBA.962 Layanan Umum	4.00	Dokumen	1.527.000.000
		:	03	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	5.00	Laporan	68.085.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	137,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	172.410.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	137,00	Orang	172.410.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,

ttd.
ICHSAN FUADY
NIP. 196510301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



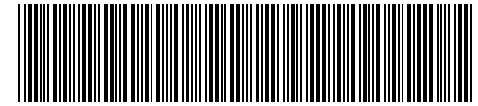
DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	8.225.582	10.940.637	-	-	-	19.166.219		
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	837.994	-	-	-	837.994		
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	-	837.994	-	-	-	837.994		
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	478.210	-	-	-	478.210	34 . 51	
01	RM	-	478.210	-	-	-	478.210	178@	
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	359.784	-	-	-	359.784	34 . 51	
01	RM	-	359.784	-	-	-	359.784	178@	
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.225.582	10.102.643	-	-	-	18.328.225		
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	-	61.265	-	-	-	61.265		
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	61.265	-	-	-	61.265	34 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



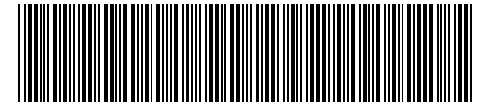
DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	61.265	-	-	-	61.265	178@	
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	-	333.000	-	-	-	333.000		
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	333.000	-	-	-	333.000	34 . 51	
01 RM		-	333.000	-	-	-	333.000	178@	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	8.225.582	7.663.258	-	-	-	15.888.840		
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	8.225.582	7.223.113	-	-	-	15.448.695	34 . 51	
01 RM		8.225.582	7.223.113	-	-	-	15.448.695	178@	
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	440.145	-	-	-	440.145	34 . 51	
01 RM		-	440.145	-	-	-	440.145	178@	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	-	2.045.120	-	-	-	2.045.120		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	1.872.710	-	-	-	1.872.710	34 . 51	
01 RM		-	1.872.710	-	-	-	1.872.710	178@	
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	172.410	-	-	-	172.410	34 . 51	
01 RM		-	172.410	-	-	-	172.410	178@	
JUMLAH		8.225.582	10.940.637	-	-	-	19.166.219		

Jakarta, 02 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,

ttd.
ICHSAN FUADY
NIP. 196510301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (686442) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	686442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	1.756.442	905.488	1.739.724	713.024	19.166.219
		BELANJA PEGAWAI	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	0	566.996	0	8.225.582
		BELANJA BARANG	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	905.488	1.172.728	713.024	10.940.637
115.01.CQ.5245		Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	70.051	837.994
115.01.WA.4355		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	69.813	70.051	837.994
115.01.WA.4355		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.143	61.265
115.01.WA.4356		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengelolaan Data dan Informasi	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.143	61.265
115.01.WA.4356		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.860	333.000
115.01.WA.6849		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740	27.860	333.000
115.01.WA.6849		51 BELANJA PEGAWAI	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	632.427	1.466.663	439.316	15.888.840
115.01.WA.6850		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengelolaan Organisasi Dan SDM	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	850.954	0	566.996	0	8.225.582
115.01.WA.6850		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	632.427	899.667	439.316	7.663.258
115.01.WA.6850		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.654	2.045.120
115.01.WA.6850		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.406	170.654	2.045.120

Jakarta, 02 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,

ttd.
ICHSAN FUADY
NIP. 196510301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [686442] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
686442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.713
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.227.235		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 2.227.235		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.725
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.660	115.01.WA	Program Dukungan Manajemen
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.970		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.508
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.106		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.065
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4356	Pengelolaan Data dan Informasi
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.557		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.130
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.233		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.130
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [686442] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6849 6849.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.880 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6850 6850.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum		Pengelolaan Organisasi Dan SDM
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 267.240 Belum ada persetujuan Menteri Keuangan. Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 460.279 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 247.254 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.788 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.598 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.813 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan Manajemen SDM Internal
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 169.290 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.545 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.343 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.430 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.090 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [686442] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.260 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,

ttd.
ICHSAN FUADY
NIP. 196510301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686442/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4706-5970-4178-9243

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [686442] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,

ttd.
ICHSAN FUADY
NIP. 196510301993031001